**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah seperti yang tercantum pada pasal 4 huruf (j)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan masuk sebagai unit kerja type A.Program kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu program prioritas Daerah yang mendapat perhatian dan komitmen dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamerupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu;1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi yang dimulai pada tahun 2016.

Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berisi tentang penjabaran visi misi kepala daerah terpilih yang didalamnya dijabarkan keterkaitan kewenangan yang dilaksanakan oleh DPPKB yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. **Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Untuk mewujudkan pelaksanaan misi kepala daerah tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana turut aktif dalam melaksanakan misi keempat yaitu **Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Dalam tahun anggaran 2018 upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan sebuah ikhtiar untuk mengendalikan jumlah kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang handal,bermartabat, beretika (berkarakter), berbudaya, memiliki tata nilai (beradab) dan berdaya saing tinggi di kancah pergaulan berbangsa dan bernegara. Dalam RPJM disebutkan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang.

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas dan kualitas pendudukan melalui gerakan keluarga berencana dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan pembangunan yang berwawasan kependudukan.Kebijakan tersebut di implementasikan dalam Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Sukabumi.

**b.Maksud dan Tujuan**

1). Maksud

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Membuat laporan Dinas tentang akuntabilitas kinerja |
| b. | Memberikan gambaran adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan pelaksanaan kegiatan (DPA) dan capaian target yang telah ditetapkan |

2). Tujuan

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. |
| b. | Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. |

**c. Tugas Pokok dan Fungsi**

Salah satu Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga  mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, terampil dan  sejahtera, didukung oleh kualitas  Pendidikan yang mumpuni serta  kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi “**mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri”**, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia, tangguh dalam memiliki kemampuan pemahaman keagamaan serta tangguh dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya alam dalam  mendukung tingkat perekonomian masyarakat. Sejalan dengan tugas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) diharapakan mampu mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan mampu Mengembangkan Kualitas Penduduk Menuju Masyarakat Kabupaten Sukabumi Yang lebih baik, religius dan mandiri.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi menurut hasil data proyeksi kependudukan pada tahun 2014 mencapai 2.422.133 jiwa yang terdiri dari 1.229.168 laki-laki dan 1.192.945 perempuan dengan sex ratio 103,04 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103 laki-laki kepadatan penduduk kabupaten sukabumi adalah sebesar 582 per Km2.

Pembangunan dibidang kependudukan di Kabupaten Sukabumi telah menunjukan hasil yang mengembirakan, jumlah penduduk mencapai **2.503.941** jiwa, dengan angka fertilitas total   (TFR : 2,21) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya pada priode 2010-2015 adalah 2 (dua) anak per 1000 wanita. Bila kita bandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, dengan jumlah penduduk sebesar 2.341.509 jiwa, maka selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Sukabumi telah bertambah penduduk  sekitar : 162.432 jiwa, artinya selama priode 2010-2017 Program Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Sukabumi dapat mengendalikan pertambahan penduduk  (kelahiran tercegah) Tahun 2016, sebanyak 83.061 bayi tertunda untuk lahir, dari potensi kelahiran sebanyak 122.635 bayi yang akan lahir dari PUS yang tidak tercegah alat kontrasepsi.

Dengan **tercegahnya kelahiran sebanyak 83.061bayi yang lahir**, bila kita hitung menurut analisis Prof. Askobart Cost and Benefit untuk penyediaan pelayanan dasar kesehatan (@ Rp. 2.500.000,-) dan pelayanan pendidikan dasar ( @ Rp. 3.500. 000,-) atau @ Rp 6.000.000,- per anak yang lahir, **maka beban anggaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi dapat diefisiensikan sebesar : Rp. 498.366.000.000,-** Sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi “***mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri”***, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia, tangguh dalam memiliki kemampuan pemahaman keagamaan serta tangguh dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya alam dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan tugas *Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (*DPPKB) diharapakan mampuMewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan mampu Mengembangkan Kualitas Penduduk Menuju Masyarakat Kabupaten Sukabumi Yang lebih baik, religius dan mandiri.

Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas kegiatan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi diarahkan pada kegiatan strategis

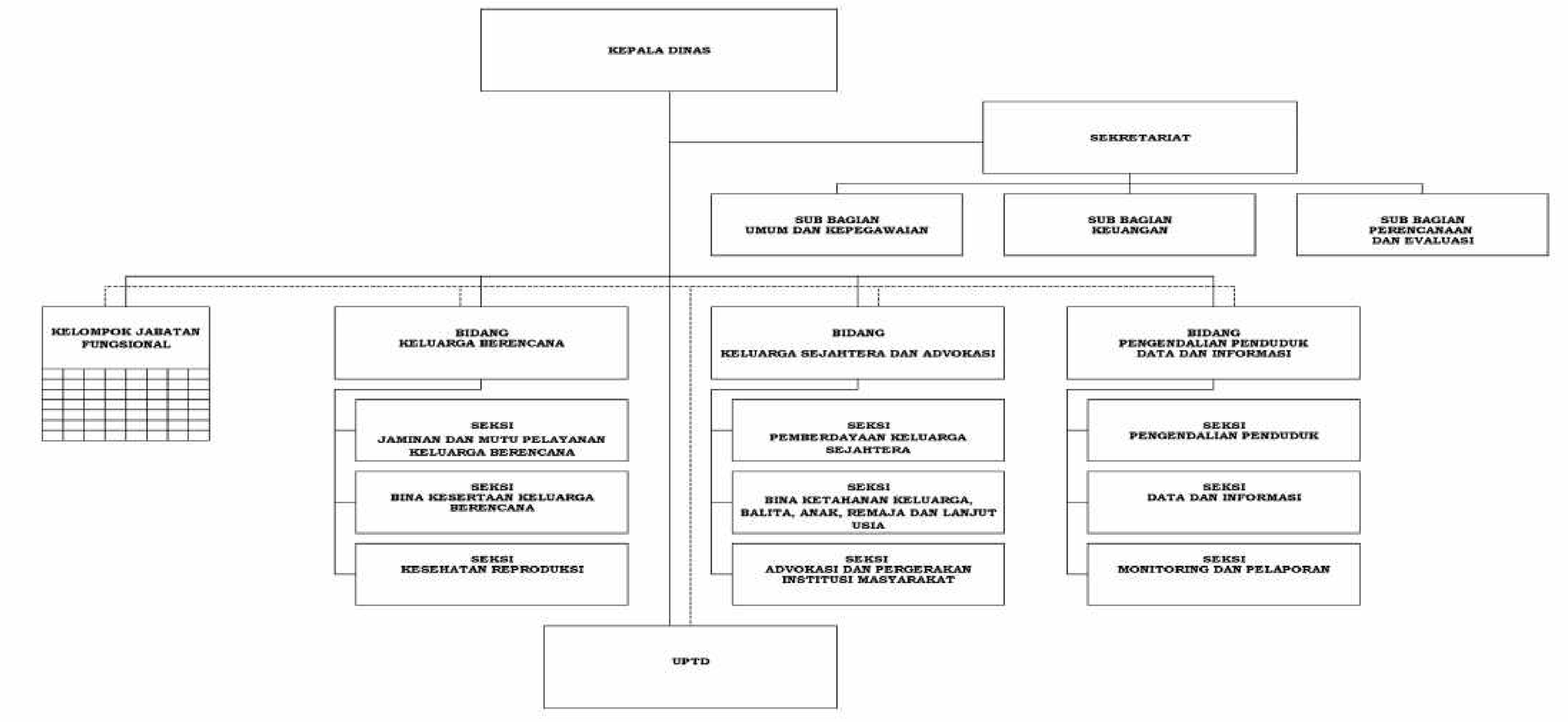
1. Program pemberdayaan keluarga
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Kesehatan Reproduksi Keluarga
4. Program Penguatan Keluarga Berkualitas
5. Program pengembangan Sistem Informasi Data Mikro Keluarga
6. Pengendalian Penduduk

Issue Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Menurunkan laju Pertumbuhan Penduduk (mengendalikan jumlah kelahiran) menjadi 1,1 persen
2. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 persen menjadi 82.10 persen, dan pembinaan keluarga

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, diatur melalui Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIN

AS

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

MARWAN HAMAMI

GA

RIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI



BUPATI SUKABUMI,

TTD

**d. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tahun 2016
5. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah kabupaten sukabumi.
8. Peraturan Bupati sukabuminomor 59 tahun 2016tentangstruktur organisasi dan tata kerjadinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Peraturan Bupati sukabuminomor 64 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategis**

1. **VISI**

Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan visi yang diusung saat pemilihan kepala daerah menjadi visi Kabupaten Sukabumi sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan Visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-citaKabupaten Sukabumi. Adapun pernyataan Visinya adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”**

1. **MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan misi, Terdapat empat misi yang ingin diwujudkan, yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran – sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL TAHUN  2015 | TARGET | | | | | | KONDISI AKHIR |
| TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN 2021 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Mewujudkan keserasian, ke selarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup | Contraceptive PrevalenceRate (CPR) cara modern  1. Cakupan sasaran pasa ngan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif | % | 70,50 | 71,92 | 69,49 | 69,52 | 69,56 | 69,60 | 69,60 | 69,62 |
|  |  | 2. Cakupan pasangan yang ingin ber-KB tidak terpe nuhi (Unmetneed) | % | 14,00 | 15,63 | 16,50 | 14,50 | 12,50 | 11,50 | 10,00 | 10,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber Kbpasangan usia subur (PUS) Pra S dan KS I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80% menjadi82 % dan pembinaan keluarga menjadi sekitar70 % | Persentase kesertaan ber KB pasangan usia subur(PUS) Pra S dan KS I an gota kelompok usaha ekonomi produktif | 82,00 | 83,00 | 82,05 | 82,10 | 82,15 | 82,20 | 82,30 | 82,30 |
|  |  | 1. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB | 80,00 | 82,00 | 82,10 | 82,20 | 82,30 | 82,40 | 82,50 | 82,50 |
|  |  | 1. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber - KB | 81,00 | 83,00 | 82,05 | 82,10 | 82,15 | 82,20 | 82,30 | 82,30 |

1. **TUJUAN**

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing tujuan paling utama untuk :

* 1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.
  2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP .
  3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
  4. Penguatan pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Keluarga.

1. **SASARAN**

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

* 1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

1. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)
5. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)
6. **STRATEGI**
7. Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang isterinya berusia 20 tahun ke atas (pendewasaan usia perkawinan)
8. Meningkatkan Cakupan Anggota Bina Ketahanan Keluarga (BKB, BKR dan BKL) ber-KB
9. **ARAH KEBIJAKAN**
10. Percepatan Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Sukabumi
11. Penyusunan Grand Design dan Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Kabupaten Sukabumi
12. Menurunkan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmeetNeed)
13. Meningkatkan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKN) menjadi 1 Petugas di setiap 2(dua) Desa/Kelurahan
14. Meningkatkan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan
15. Meningkatkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi perminataan masyarakat setiap tahun
16. Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun
17. Revitalitasasi Program Keluarga Kecil Berkualitas dengan melalui peningkatan :

1. kesehatan;

2. pendidikan;

3. nilai agama;

4. perekonomian; dan

5. nilai sosial budaya

1. **PROGRAM**

Program Rutin / EX-BAU

* 1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  2. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur; dan
  3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  4. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Kegiatan

1. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
2. Program keluarga kecil yang berkualitas.
3. **PRIORITAS**

Prioritas kegiatanyang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kegiatan – kegiatan yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan ketahanan keluarga.

1. **SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada tahun anggaran 2018 sesuai dokumen pelaksanan anggaran yang ada maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi melaksanakan 6 (enam) program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.**18.007.344.550**Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| **NO** | **URAIAN** |
| --- | --- |
|  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| 2 | Pelayanan Administrasi Aset |
|  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer |
|  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |
| 7 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
|  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |
| 8 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 9 | Penyusunan Laporan Keuangan |
|  | **Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 10 | Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 11 | Pelayanan Peserta KB Baru (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 12 | Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 13 | Pembinaan Peserta KB Aktif (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 14 | Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS) |
| 15 | Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran Data Mutasi Data Keluarga dan Individu Anggota Keluarga |
| 16 | Pengelolaan Database Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi |
| 17 | Pengendalian dan Penyediaan Data Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi |
| 18 | Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 19 | Penggarapan KIE Melalui Mobil Unit Pelayanan |
| 20 | Peningkatan Pembinaan Petugas Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 21 | Penyelenggaraan Harganas |
| 22 | Perencanaan dan Pengendalian Penduduk |
| 23 | Perencanaan dan Pengendalian Program |
| 24 | Pergerakan dan Bina Lini Lapangan Serta Institusi Masyarakat Pedesaan |
| 25 | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) |
| 26 | DAK Reguler Keluarga Berencana (DAK Reguler 2018) |
| 27 | Peningkatan Kapasitas Remaja melalui Saka Kencana |
| 28 | Penggarapan Khusus (Rapsus) |
| 29 | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) |
| 30 | Analisa Dampak Penduduk |
| 31 | Kerjasama Pendidikan Kependudukan |
| 32 | Kesehatan Reproduksi (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 33 | Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 34 | Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi |
|  | **Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas** |
| 35 | Pembentukan Kampung KKB (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 36 | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 37 | Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) |
| 38 | Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja |

* 1. **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai**.**

Penyusun Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Waktu Penyusunan

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian kinerja antara kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi (Bupati) adalah sebagai berikut :

**`**

** DPPKB KABUPATEN SUKABUMI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang **efektif, transfaran**  dan **akuntabel** serta **berorientasi pada hasil,**  yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc**

Jabatan : Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**

Jabatan : Bupati Sukabumi

Selanjutnya disbut **pihak kedua.**

**Pihak pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sukabumi, Januari 2018 |
| **Pihak Kedua**  Bupati Sukabumi  **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** | **Pihak Pertama**  Kepala DPPKB  Kabupaten Sukabumi  **Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

**BKKBD KABUPATEN SUKABUMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN KINERJA** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 69,52% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82% menjadi 82,10% dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 82,10% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | | **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** |
| **1** | **Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | **15.900.260.550** |
| **2** | **Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas** | | **516.351.000** |
| **JUMLAH** | | | 16.416.611.550 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sukabumi, Januari 2018 |
| **Bupati Sukabumi**  **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** | **Kepala DPPKB**  **Kabupaten Sukabumi**  **Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc** |

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinn instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja kepala dinas diketahui oleh Bupati selanjutnya perjanjian kinerja yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bupati ditindaklanjuti secara berjenjang oleh para pemegang kegiatan dan diketahui oleh atasan langsungnya masing – masing.

Kegiatan yang dipegang oleh para kasubag yang berada di sekretariat maka perjanjian kinerjanya diketahui oleh sekretaris, sedangkan yang ada dibidang diketahui oleh kepala bidangnya.

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya untuk mencapai output yang telah ditentukan sehingga anggaran yang dikelolanya menjadi berhasil guna dan mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan.

Perjanjian kinerja dibuat 2 (dua) kali yaitu perjanjian kinerja awal dan perjanjian kinerja perubahan.

TABEL 2.2

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis(AWAL)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN | %  ANGGARAN |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhanpenduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern | 69,52% | Pengendalian pendu duk dan keluarga beren cana | **15.900.260.550** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomiproduktif dari 82 % menjadi82,10 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber KB, Pasangan Usia Subur(PUS), dan Pra-S dan KS-I,Anggota Poktan, BKB, BKR, BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 82,10% | Keluarga Kecil Yang Berkualitas | **516.351.000** |  |

* 1. **Rencana Kerja dan Anggaran**

Rencana Kerja Anggaran yang dialokaskan untuk mencapai perjanjian kinerja yang telah disepakati antra Bupati dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumu, sebagai berikut :

TABEL 2.3

Tabel Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan DPPKB Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISI :** | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | | Anggaran |
| Satuan | target | Program | Kegiatan | Rp. |
| Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup | Mengendalikan jumlah kelahiran | Penduduk tumbuh seimbang | .... | 69.52 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan (DBH Pajak Rokok 2018) | 285.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pelayanan Peserta KB Baru (DBH Pajak Rokok 2018) | 100.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (DBH Pajak Rokok 2018) | 100.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Peserta KB Aktif (DBH Pajak Rokok 2018) | 100.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS) | 30.202.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran Data Mutasi Data Keluarga dan Individu Anggota Keluarga | 47.042.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pengelolaan Database Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi | 560.800.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pengendalian dan Penyediaan Data Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi | 109.467.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi (DBH Pajak Rokok 2018) | 107.350.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Penggarapan KIE Melalui Mobil Unit Pelayanan | 240.609.200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Pembinaan Petugas Kependudukan dan Keluarga Berencana | 46.467.350,00 |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Harganas | 172.459.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Perencanaan dan Pengendalian Penduduk | 59.661.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Perencanaan dan Pengendalian Program | 123.571.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pergerakan dan Bina Lini Lapangan Serta Institusi Masyarakat Pedesaan | 101.200.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) | 1.902.650.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | DAK Reguler Keluarga Berencana (DAK Reguler 2018) | 1.130.689.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Remaja melalui Saka Kencana | 40.125.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Penggarapan Khusus (Rapsus) | 18.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | 3.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Analisa Dampak Penduduk | 97.334.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kerjasama Pendidikan Kependudukan | 116.599.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kesehatan Reproduksi (DBH Pajak Rokok 2018) | 150.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) | 1.902.650.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi | 52.545.000,00 |
| Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin | Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Pembinaan Pemberdayaan Keluarga | keluarga kecil bahagia dan sejahtra |  | 82,15 | Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas | Pembentukan Kampung KKB (DBH Pajak Rokok 2018) | 100.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) | 140.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) | 100.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja | 176.351.000,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program, kebijakan dan semua kegiatan mengacu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanauntuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kebijakan dan kegiatan Tahun 2018diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas Instansi pemerintah.

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program ini bertujuan untuk :

* Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Keluarga Berencana (KB);
* Meningkatkan kesertaan KB aktif mandiri/swasta;
* Memetakan dan mempercepat penggarapan pelayanan KB di daerah khusus;
* Mengembangkan pola dan optimalisasi kemitraan;
* Meningkatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas;
* Mengendalikan angka kelahiran;
* Melakukan validasi terhadap data keluarga yang belum akurat.

Sasaran program adalah :

- Meningkatnya jumlah peserta program KB aktif per jumlah Pasangan Usia Subur (PUS);

- Menurunnya angka kelahiran.

1. PROGRAM KELUARGA KECIL BERKUALITAS

Tujuan program yaitu :

* Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembinaan kelompok-kelompok pemberdayaan keluarga;
* Mengembangkan model-model Keterpaduan Program dan Pemberdayaan Keluarga;
* Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
* Mengembangkan model kampung KKB sebagai upaya pelestarian dan kemandirian peserta KB
* Meningkatkan kualitas remaja, mencegah dari bahaya penyakit HIV-AIDs dan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba)

Sasaran program adalah menurunnya Keluarga Miskin Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Alasan Ekonomi (Alek).

* 1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Berdasarkan sasaran program, Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada revisi RPJMD 2016-2021, yaitu penggunaaan ***Contraceptive Prevalence Rate*** (CPR) cara modern dan Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga. Berikut capaian kinerja pada tahun 2018

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Indikator Kinerja Tahun 2018** | | **Capaian** |
| target | Realisasi | **%** |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | % | 69,52% | 70,88% | 104,16% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | % | 82.20.% | 84,72 | 103,70% |

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern adalah peserta KB Aktif dibandingkan dengan pasangan usia subur (PUS), PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang syah, yang istrinya berumur diatas 15 tahun sampai dengan 49 tahun, sedangkan peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang saat ini menggunakan salahsatu alat kontrasepsi (IUD, MOP, MOW IMPLANT, SUNTIK, PIL, dan KONDOM)

Yang dimaksud dengan indikator kedua Presentasi Kelompok Kegiatan adalah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan dan masih berstatus PUS serta menjadi peserta KB Aktif.

Kelompok kegiatan (POKTAN) adalah wadah kegiatan program KKBPK yang berkaitan dengan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan diantaranya keluarga yang mempunyai anak balita (BKB) anak remaja (BKR) dan keluarga yang mempunyai lansia (BKL).

1. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

Tahun 2017 dengan Tahun 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Realisasi Kinerja** | | **%** |
| 2017 | 2018 |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | % | 70,78 % | 70,88% | 100,14% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | % | 86,08 % | 84,72 % | 98,42% |

Berdasarkan tabel diatas peserta KB aktif dengan PUS Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 70,88% dari 70,78% atau 100,14%, sedangkan presentase kesertaan ber-KB, Pasangan Usia Subur Anggota Poktan, BKB, BKR, BKL dan UPPKS menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 84,72% dari 86,08 % dikarenakan jumlah anggota TRIBINA yang berstatus PUS yang ikut ber-KB adanya penurunan dikarenakan Monopause, Hamil, Pindah, Lahir, Cerai dan lain-lain, serta adanya perapihan dan pemutakhiran data kelompok Tribina dan UPPKS.

Grafik 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

1. **Perbandinganrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Berdasarkan sasaran program pada Renstra DPPKB, penggunaan ***Contraceptive Prevalence Rate*** (CPR)cara modern harus mampu menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1%, dan Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga, target jangka menegah pada dokumen perencanaan strategis DPPKB presentasi peserta KB aktif dengan PUS Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Moderntarget 69,52% dan pada ahir Renstra DPPKB harus mencapai 69.62%, sedangkan presentasejangka menengah pada indikator kesertaan ber-KB, Pasangan Usia Subur Anggota Poktan, BKB, BKR, BKL dan UPPKS dengan target 82.20%.

Berikut tabel dan grafis perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengahpada dokumen renstra DPKKB Kab. Sukabumi.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target Kinerja Renstra PD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target Jangka Menengah** | **Realisasi Tahun 2018** | **%** |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 69,52% | 70,88% | 104,16% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 82.20% | 84,72 | 103,70% |

Bedasaarkan Tabel diatas capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan DPPKB Kabupaten Sukabumi. Indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern 70,88% atau 104,16% dari target dan indikator Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB 84,72 atau 103,70% dari target jangka menengah

Grafis 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target Kinerja Jangka Menengah Renstra PD

1. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan / peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab Keberhasilan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi Tidak Lepas Dari Beberapa faktor, diantaranya:

1. Kelengkapan kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi (DPPKB), dibantu dengan sekretaris dan 3 bidang, serta terbentuknya Unit Pelaksana Teknis DALDUK di lingkungan DPPKB Kabupaten Sukabumi.
2. Sumber Daya Manusia, Tenaga Penyuluh KB 1 Desa 1 Petugas ditambah dengan operator pengolah data 1 orang di setiap Kecamatan
3. Dukungan Anggaran **15.900.260.550,00 untuk indikaor** Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern, dan Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB sebesar **516.351.000,00.** Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Dinas/Badan Tahun 2018 di bandingkan dengan tahun sebelum dan akhir renstra:

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Dinas/Badan Tahun 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Capaian Tahun 2017** | **Realisasi Tahun 2018** | | | **Target Akhir Renstra** | **Capaian Tahun 2018 terhadap target akhir Renstra (%)** |
| Target | Realisasi | % |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 70,78% | 69,52% | 70,88% | 104,16% | 69.62% | 101,80% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 86,08% | 82.20% | 84,72% | 103,70% | 82,3% | 102.94% |

Grapik 3.4 Pencapaian Kinerja Dinas/Badan Tahun 2018

1. **Analisis dan Efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.5

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** |  | **Penyerapan Anggaran** | **Tingkat Efisiensi** |
| **% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja ≥ 100%)** |
|
|
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 104,16% | 97,60% | 2,40% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 103,70% | 94,92% | 5,08% |

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian kinerja DPPKB pada tahun 2018 dengan Penyerapan Anggran dan Efisiensi dari kedua indikator Kinerja DPPKB,

Grafik 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi anggaran pada tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja dari total anggaran yang di alokasikan untuk kedua indikator yaitu 98% .

1. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan PencapaianKinerja**

Tabel 3.6

Analisis Program / Kegiatan Yang menunjang keberhasilan

| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **% Capaian** | **Program** | **Kegiatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 70,88% | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pelayanan Peserta KB Baru (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Peserta KB Aktif (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS) |
|  |  |  |  |  | Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran Data Mutasi Data Keluarga dan Individu Anggota Keluarga |
|  |  |  |  |  | Pengelolaan Database Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi |
|  |  |  |  |  | Pengendalian dan Penyediaan Data Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi |
|  |  |  |  |  | Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Penggarapan KIE Melalui Mobil Unit Pelayanan |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Pembinaan Petugas Kependudukan dan Keluarga Berencana |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Harganas |
|  |  |  |  |  | Perencanaan dan Pengendalian Penduduk |
|  |  |  |  |  | Perencanaan dan Pengendalian Program |
|  |  |  |  |  | Pergerakan dan Bina Lini Lapangan Serta Institusi Masyarakat Pedesaan |
|  |  |  |  |  | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) |
|  |  |  |  |  | DAK Reguler Keluarga Berencana (DAK Reguler 2018) |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Remaja melalui Saka Kencana |
|  |  |  |  |  | Penggarapan Khusus (Rapsus) |
|  |  |  |  |  | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) |
|  |  |  |  |  | Analisa Dampak Penduduk |
|  |  |  |  |  | Kerjasama Pendidikan Kependudukan |
|  |  |  |  |  | Kesehatan Reproduksi (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 84,72% | Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas | Pembentukan Kampung KKB (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga (DBH Pajak Rokok 2018) |
|  |  |  |  |  | Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja |

1. **Realisasi Anggaran**

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 15.900.260.550,00 | 15.519.118.392,00 | 97,60% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 516.351.000,00 | 490.113.500,00 | 94,92% |

Untuk mendukung indikator pertama Program ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **15.900.260.550**,- terealisasi sebesar Rp. **15.519.118.392**,- atau **97,60%**guna menjalankan program tersebut ada 34 kegiatan pada tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

* + - * 1. Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan (DBH Pajak Rokok 2018)dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.000.000terealisasi sebesar Rp.284.563.600atau 99,85 %.
        2. Pelayanan Peserta KB Baru (DBH Pajak Rokok 2018),dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100%.
        3. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (DBH Pajak Rokok 2018), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 99.885.000,00 atau 99,89%
        4. Pembinaan Peserta KB Aktif (DBH Pajak Rokok 2018), dengan alokasi anggaran sebesarRp. 100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00atau 100%.
        5. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.202.000,00terealisasi sebesar Rp.30.202.000,00atau 100%.
        6. Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran Data Mutasi Data Keluarga dan Individu Anggota Keluargadengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.042.000,00, terealisasi sebesar Rp.47.042.000,00atau 100%.
        7. Pengelolaan Database Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasidengan anggaran sebesar Rp. 560.800.000,00, terealisasi sebesar Rp. 556.050.000,00 atau 99,15%
        8. Pengendalian dan Penyediaan Data Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi, dengan anggaran sebesar Rp. 109.467.000,00, terealisasi sebesar Rp. 109.467.000,00atau 100%.
        9. Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi (DBH Pajak Rokok 2018), dengan anggaran sebesar Rp. 107.350.000,00, terealisasi sebesar Rp.107.350.000,00atau 100%.
        10. Penggarapan KIE Melalui Mobil Unit Pelayanan, dengan anggaran sebesar Rp. 240.609.200,00, terealisasi sebesar Rp.231.074.200,00atau 96,04%.
        11. Peningkatan Pembinaan Petugas Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.467.350,00, terealisasi sebesar Rp. 46.467.350,00 atau 100%.
        12. Penyelenggaraan Harganas, dengan anggaran sebesar Rp. 172.459.000,00, terealisasi sebesar Rp. 165.609.000,00 atau 96,03%.
        13. Perencanaan dan Pengendalian Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.661.000,00, terealisasi sebesar Rp. 59.661.000,00 atau 100%.
        14. Perencanaan dan Pengendalian Program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.571.000,00, terealisasi sebesar Rp. 122.071.000,00 atau 98,79%.
        15. Pergerakan dan Bina Lini Lapangan Serta Institusi Masyarakat Pedesaan, dengan anggaran sebesar Rp. 101.200.000,00, terealisasi sebesar Rp. 101.200.000,00 atau 100%.
        16. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.205.490.000,00, terealisasi sebesar Rp. 10.073.099.162,00 atau 98,70%.
        17. DAK Reguler Keluarga Berencana (DAK Reguler 2018), dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.689.000,00, terealisasi sebesar Rp.940.375.680,00atau 83,17%.
        18. Peningkatan Kapasitas Remaja melalui Saka Kencana, dengan anggaran sebesar Rp. 40.125.000,00, terealisasi sebesar Rp. 40.125.000,00 atau 100%.
        19. Penggarapan Khusus (Rapsus), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,00atau 100%.
        20. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100%.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berakhir sampai tanggal 31 Desember 2018. Penyerapan anggran sangat bervariasi yaitu ada yang mencapai 100 % ada pula yang dibawah 100 %. Secara keseluruhan capaian penyerapan anggaan per program menunjukkan angka yang menggembirakan, uraian lengkpnya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000. dan realisasi Rp. 369.534.000 atau 73,91 %
2. Peningkatan sarana prasarana aparatur 4 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 805.685.550. dan realisasi Rp. 641.344.459atau 79,60 %
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 kegiatandengan pagu anggaran Rp. 83.990.000. dan realisasi Rp. 83.590.000atau 99,52 %
4. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 21 kegiatandengan pagu anggaran Rp. 9.971.022.411. dan realisasi Rp. 9.888.165.150atau 99,17 %
5. Keluarga kecil yang berkualitas 4 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 811.163.300dan realisasi Rp. 810.742.300 atau 99,95 %

Capaian tersebut dari satu sisi sangat menggembirakan yaitu capaian mayoritas meraih angka diatas 99 % namun demikian masih terdapat kegiatan/program yang belum menggembirakan dengan capaian hanya 70 % nan dan hal tersebut menjadi catatan untuk diperbaiki pada waktu yang akan datang.

1. **Saran**

Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja dari sasaran yang telah di tetapkan. Berikut beberapa saran untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja DPPKB pada tahun 2018:

1. Kelengkapan kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi (DPPKB), harus dimaksimalkan khsusunya di tingkat kecamatan dengan membentuk jumlah UPTD sesuai dengan jumlah kecamtan.
2. Memperbanyak Promosi Program KKBPK melalui berbagai media
3. Melakukan Sosialisai kepada masyarakat khususnya pasangan nusia subur agar tidak menunda untuk ber KB
4. Melibatkan peran serta Masyarakat, Organisasi, Mitra Kerja dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. **Perjanjian Kinerja**

** DPPKB KABUPATEN SUKABUMI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang **efektif, transfaran**  dan **akuntabel** serta **berorientasi pada hasil,**  yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc**

Jabatan : Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**

Jabatan : Bupati Sukabumi

Selanjutnya disbut **pihak kedua.**

**Pihak pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sukabumi, Januari 2018 |
| **Pihak Kedua**  Bupati Sukabumi  **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** | **Pihak Pertama**  Kepala DPPKB  Kabupaten Sukabumi  **Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

**BKKBD KABUPATEN SUKABUMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN KINERJA** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 % | Contraceptive prevalence Rate (CPR) Cara Modern | 69,52% |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82% menjadi 82,10% dan pembinaan keluarga | Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB | 82,10% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | | **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN** |
| **1** | **Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | **15.900.260.550** |
| **2** | **Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas** | | **516.351.000** |
| **JUMLAH** | | | 16.416.611.550 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sukabumi, Januari 2018 |
| **Bupati Sukabumi**  **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** | **Kepala DPPKB**  **Kabupaten Sukabumi**  **Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc** |

1. **SK TIM**

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

# Jalan Pelabuan II Km.5 No. 171 Kadulawang Lembursitu Telepon (0266) 221491, 226988

# Faksimil: (0266) 230736 Website: [www.bkkbdkabsi.net](http://www.bkkbdkabsi.net)e-mail: dppkbkabsukabumi@gmail.com

Sukabumi43195 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**

**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKABUMI**

**Nomor :**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS**

**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN SUKABUMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. Bahwa dalam rangka mendorong Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented governance*) diperlukan pengukuran akuntabilitas  kinerja hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan;  b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a. Perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2017;  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi;  6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;  7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi bertugas :  a. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja berdasarkan pelaksanaan tupoksi, program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2017;  b. Melakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;  c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2017. |
| KETIGA | : | Masa kerja Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 berakhir setelah LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi disahkan dan diterima oleh Instansi Penilai. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.  Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  ditetapkan di : Sukabumi  Pada Tanggal : Februari 2018  Kepala |
|  |  |  |

**Hj. AISAH, SE.Ak., M.Sc**

Pembina Utama Muda

NIP. 196602131990032005

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMOR | : | |
| TANGGAL | : | |
| TENTANG | : | Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi tahun 2018 |

1. Ketua : Kepala Dinas

2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas

3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

4. Anggota : 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana

2. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi

4. Kepala Seksi Jaminan Mutu Pelayanan KB

5. Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana

6. Kepala Seksi Kesehatan Reproduski

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

8. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat

9. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia

10. Kepala Seksi Data dan Informasi

11. Kepala Seksi Monitoring dan Pelaporan

12. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk

11. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Sukabumi |
| pada tanggal | : | Februari 2018 |
| Kepala | | |
| **Hj. AISAH,SE,AK.,M.Sc** | | |
| Pembina Utama Muda | | |
| NIP. 19660213 199003 2 005 | | |

|  |
| --- |
| **LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS** |
| **NOMOR : sekret** |
| **TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA** |
| **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKABUMI** |

**3. IKU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKABUMI**

NAMA ORGANISASI : DPPKB Kabupaten Sukabumi

TUGAS : Membantu bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pemantuan yang menjadi kemenangan

daerah di Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

|  |
| --- |
| FUNGSI : Penyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; |
| Pelaksanaan kebijakan daerah di bidangkeluarga berencana; bidang keluarga sejahtera dan advokasi; bidang pengendalian penduduk data dan informasi; |
| Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang keluarga berencana bidang keluarga sejahtera dan advokasi; bidang pengendalian penduduk data dan informasi; |
| Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang keluarga berencana; bidang keluarga sejahtera; bidang pengendalian penduduk, data dan informasi; |
| Pembinaan administrasi dilingkungan dinas; |
| Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas; |
| Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; |
| Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan |
| Pelaporan hasil pelaksanaan tugas. |

**Revisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 - 2021**

| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN/FORMULASI HITUNGAN** | **SUMBER DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menurunnya laju pertumbuhan  penduduk | Contraceptive Prevalence Rater (CPR) cara modern | Salah satu Cara Pengendalian penduduk melalui kesertaan masyarakat dalam ber-KB |  |
| Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | Peserta KB Aktifx 100 | BIDANG DALTIN DPPKB |
| Pasangan Usia Subur |
| Cakupan pasangan yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | Ingin Anak Ditunda + Tidak Ingin Anak Lag ix 100 | BIDANG DALTIN DPPKB |
| Pasangan Usia Subur |
| 2 | Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga | Persentase kesertaan ber-KB pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif | Peserta KB Aktif KPS & KS I Poktan UPPKS x100  Pos KPS & KS I Poktan UPPKS | BIDANG DALTIN DPPKB |
| Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB | Peserta KB AktifAnggota Bina Keluarga Balita x100 | BIDANG DALTIN DPPKB |
| Pasangan Usia Subur Anggota Bina Keluarga Balita |
| Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkaatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Peserta KB AktifAnggota UPPKS x 100 | BIDANG DALTIN DPPKB |
| Pasangan Usia Subur Anggota UPPKS |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sukabumi, Januari 2018  KEPALA DPPKB  KABUPATEN SUKABUMI  **Hj. AISAH, SE,Ak.,M.Sc**  NIP. 196602131990032005 |